



Untuk segera diterbitkan

Pemprov Jateng Berhasil Mempertahankan Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Semarang, Jumat (23/05/25) – Anggota V selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2024 kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto. Atas LKPD Provinsi Jateng, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut merupakan opini WTP yang ke-14 bagi Pemerintah Provinsi Jateng.

Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jateng Tahun 2024 dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V Widhi Widayat dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Hadir pula para pejabat struktural BPK Jateng dan tim pemeriksa BPK atas LKPD Provinsi Jateng Tahun 2024.

Anggota V selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jateng yang telah berhasil mempertahankan opini WTP. Bobby Adhityo Rizaldi berharap capaian ini hendaknya dapat menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Lebih lanjut Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, meskipun memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- Pelaksanaan paket pekerjaan infrastruktur tidak sesuai kontrak, antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, dan keterlambatan pembayaran;
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memiliki prosedur penatausahaan jaminan pertambangan sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan jaminan pertambangan dan adanya kekurangan penempatan jaminan pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dari hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng Tahun 2024, sampai dengan saat ini, sebagian telah ditindaklanjuti. Menutup sambutannya, Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan Pemerintah Provinsi Jateng untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
Telp. 024-8660826 Ext. 2013
Email: humas.jateng@bpk.go.id